

PENERAPAN IMBALAN PASCA KERJA PADA BPRS ABC BERDASARKAN SAK ETAP 23 TENTANG IMBALAN KERJA

Fika Fitriana¹, Lihan Rini Puspo Wijaya², Damayanti³

¹ mahasiswa, ² pembimbing 1, ³ pembimbing 2

Abstrak

Tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk menjelaskan perlakuan imbalan pasca kerja yang seharusnya diterapkan oleh BPRS ABC menurut SAK ETAP Bab 23. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan studi dokumen, sedangkan analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan, imbalan pasca kerja yang dapat BPRS ABC terapkan adalah program iuran pasti. Perlakuan akuntansi imbalan pasca kerja iuran pasti menurut SAK ETAP yang harus BPRS terapkan adalah (a) Pengakuan dan Pengukuran: iuran harus diakui sebagai beban dan kewajiban pada periode berjalan, serta perhitungan imbalan pasca kerja yang dapat BPRS ABC hitungkan dapat dengan *Metode Projected Unit Credit (PUC)* (b) Pengungkapan: BPRS ABC harus mengungkapkan jumlah biaya iuran pasti untuk periode dan jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi sebagai beban untuk program iuran pasti, serta dapat disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pengurang laba bruto dan laporan posisi keuangan penambah kewajiban.

Kata Kunci: Imbalan Pasca Kerja, Penerapan, SAK ETAP 23

PENDAHULUAN

Berdasarkan penjelasan atas Peraturan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dalam rangka mendukung perkembangan perekonomian nasional, diperlukan lembaga perbankan yang mampu memberikan layanan secara luas kepada masyarakat salah satunya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam menjalankan kegiatan usahanya BPRS harus selalu konsisten dalam menerapkan prinsip syariah dan memegang teguh prinsip kehati-hatian agar terbentuknya BPRS yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada

masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Pemberian layanan yang terbaik kepada masyarakat tidak lepas dari terlibatnya karyawan-karyawan yang bekerja di BPRS ABC. Kerja keras karyawan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat harus diapresiasi dengan semestinya. Salah satu yang dapat BPRS lakukan adalah dengan memberikan kepastian penghasilan di masa depan dengan melakukan pencadangan imbalan pasca kerja berupa pensiun. Selain dapat memberikan kepastian penghasilan di masa depan, pemberian pensiun kepada

para karyawan BPRS juga dapat memberikan motivasi untuk lebih giat bekerja.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pemerintah telah mengatur tentang kesejahteraan karyawan suatu perusahaan pada SAK ETAP Bab 23 dan UU No. 13/2003. SAK ETAP Bab 23 mengatur pencatatan imbalan kerja, sedangkan UU No. 13/2003 mengatur hubungan pemberi kerja dan pekerjanya. SAK ETAP Bab 23 memuat beberapa imbalan kerja, salah satunya imbalan pasca kerja. Pemberi kerja dapat membentuk imbalan pasca kerjanya, misalnya pensiun.

Saat ini masih ada BPRS yang belum menerapkan imbalan kerja seperti imbalan pasca kerja, salah satunya BPRS ABC belum menerapkan imbalan kerja tersebut. Padahal SAK dan Pemerintah telah mengatur imbalan kerja dalam SAK ETAP Bab 23 dan UU No.13 tahun 2003. Selain tidak mengikuti aturan pemerintah, ketika pengauditan BPRS akan cenderung mendapatkan opini WDP atau Wajar dengan Pengecualian karena laporan keuangan disajikan diperiode berjalan tidak dalam keadaan sebenarnya sebab belum di akui nya perlakuan akuntansi imbalan pasca kerja berupa pensiun oleh BPRS ABC.

Karya Ilmiah ini bertujuan untuk menjelaskan perlakuan imbalan pasca

kerja yang seharusnya diterapkan oleh BPRS ABC menurut SAK ETAP Bab 23.

METODE PELAKSANAAN

Penulisan karya ilmiah ini membutuhkan daftar nama dan gaji karyawan tahun 2017. Jenis data yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan yaitu wawancara kepada Auditor Senior di KAP ZK, sedangkan data sekunder yang dibutuhkan yaitu daftar nama dan gaji karyawan tahun 2017.

Proses selanjutnya setelah pengumpulan data yaitu menganalisis data. Untuk menyusun karya ilmiah ini metode analisis yang diperlukan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penjelasan-penjelasan dari penelitian yang tidak dapat diukur berupa angka. Menurut Sujarweni (2014) Tujuan utama penelitian kualitatif adalah gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan dalam bentuk rangkaian kata atau deskripsi mengenai fenomena atau gejala sosial tersebut. Tahapan-tahapan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan karya ilmiah ini yaitu daftar nama dan gaji karyawan tahun 2017,

- b. Mengumpulkan informasi berupa ketentuan dan dampak terhadap BPRS ABC yang belum menerapkan imbalan pasca kerja, dan
- c. Mengidentifikasi perlakuan akuntansi imbalan pasca kerja pada BPRS ABC sesuai SAK ETAP 23, diantaranya:

- (i) Pengakuan dan Pengukuran,

Rumusan yang dapat diperlukan dalam menentukan nilai imbalan pasca kerja BPRS ABC sesuai Standar Akuntansi Keuangan yaitu menggunakan *Metode Projected Unit Credit (PUC)*. Rumus PUC terdapat 2 (dua) yaitu (a) Biaya Jasa Kini (*Current Service Cost / CSC*) Rumusan ini digunakan untuk BPRS ABC dalam memperhitungkan imbalan pasca kerjanya untuk periode tahun berjalan dan (b) Kewajiban Kini (*Present Value Of Obligation / PBO*). Kewajiban imbalan pasca kerja lalu atas jasa yang diberikan oleh pekerja yang akan dibayarkan saat ini.

Pengukuran imbalan pasca kerja, BPRS ABC hanya akan menggunakan biaya jasa kini saja, karena BPRS ABC menghitung imbalan pasca kerjanya untuk periode berjalan.

- (ii) Pengungkapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik telah mengatur imbalan pasca kerja tersebut pada bab 23, karena dapat memberikan kepastian penghasilan di masa depan. Pembahasan kali ini, penulis mengambil salah satu perusahaan di Bandar Lampung yaitu BPRS ABC yang belum menerapkan imbalan pasca kerja tersebut.

Akuntansi imbalan pasca kerja yang dapat BPRS ABC terapkan adalah jenis imbalan pasca kerja program iuran pasti sebab jenis imbalan tersebut merupakan imbalan yang paling sederhana.

Pengakuan dan Pengukuran

Apabila diterapkan pada BPRS ABC mengenai jasa yang telah diberikan oleh pekerja kepada entitas selama suatu periode, maka BPRS ABC harus mengakui iuran yang terutang untuk periode berjalan:

- (a) Sebagai kewajiban.
- (b) Sebagai beban,

Iuran yang dibayarkan oleh BPRS ABC apabila menerapkan imbalan pasca kerja diakui sebagai beban, dan kewajiban diakui ketika BPRS ABC telah membayar imbalan pasca kerja tersebut namun belum dibayarkan kepada pekerja.

Perhitungan untuk imbalan pasca kerja yang akan BPRS ABC akui dapat menggunakan *Metode Projected Unit Credit (PUC)* untuk menghitung beban pensiun dan kewajiban pada periode berjalan. Pada metode ini BPRS ABC mengalokasikan imbalan ke periode berjalan untuk menentukan biaya jasa kini dan periode sebelumnya untuk menentukan nilai kini kewajiban. Namun BPRS ABC mengalokasikan imbalan pasca kerjanya ke periode berjalan, sehingga BPRS ABC hanya memerlukan rumus perhitungan dari biaya jasa kini. Penulis telah melakukan perhitungan pada 21 karyawan BPRS ABC menggunakan biaya jasa kini sehingga mendapatkan hasil pembebanan yang harus BPRS bebaskan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 144.683.608.

Pengungkapan

BPRS ABC harus mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban pada periode berjalan di akhir tahun pelaporan sebelum 12 bulan.

Beban disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pengurang laba bruto, dan kewajiban disajikan dalam laporan posisi keuangan bagian kewajiban yang harus BPRS ABC sajikan dalam laporan keuangannya apabila menerapkan imbalan pasca kerja iuran pasti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada Bab IV, maka penulis menyimpulkan bahwa imbalan kerja yang dapat BPRS ABC terapkan adalah imbalan kerja iuran pasti dengan perlakuan akuntansi imbalan pasca kerja yang seharusnya diterapkan oleh BPRS ABC sesuai SAK ETAP Bab 23 yaitu (1) pengakuan dan pengukuran: sebagai kewajiban (setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar) dan sebagai beban. Perhitungan untuk imbalan pasca kerja yang BPRS ABC dapat akui dengan menggunakan *Metode Projected Unit Credit (PUC)* untuk menghitung beban pensiun dan kewajiban yang dibebankan pada periode berjalan dengan rumus perhitungan dari biaya jasa kini. Setelah dilakukannya perhitungan dapat diketahui bahwa beban pensiun dan kewajiban yang harus BPRS ABC bebaskan sebesar Rp 144.683.608, serta (2) pengungkapan: Untuk menerapkan imbalan pasca kerja program iuran pasti, BPRS ABC harus mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban pada periode berjalan di akhir tahun pelaporan sebelum 12 bulan. Penyajian imbalan pasca kerja program iuran pasti dapat disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pengurang laba bruto dan

laporan posisi keuangan penambah kewajiban.

Saran

Saran yang diberikan untuk BPRS ABC adalah agar dapat menerapkan imbalan pasca kerja sesuai dengan SAK ETAP bab 23 tentang imbalan kerja, agar laporan keuangan yang disajikan sesuai SAK ETAP dan diharapkan BPRS ABC juga membayarkan imbalan pasca kerja kepada karyawannya sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

REFERENSI

Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Penjelasan atas Peraturan Nomor 03/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jakarta. www.ojk.co.id (diakses 22 April 2018)

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. PUSTAKABARUPRESS. Yogyakarta

Jurnal Fika F.docx



2 menit yang lalu

19%

Risiko dari plagiarisme

MEDIUM

Parafrase

3%

Kutipan salah

0%

Concentration



Bagikan

Deep

\$ 1.00

Other services

1

View report

\$ 1.98

